



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda ini memberikan gambaran tentang kinerja Bappeda pada tahun 2021. LKjIP merupakan alat ukur akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai saran yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja di waktu yang akan datang.



LKjIP BAPPEDA JAYAWIJAYA 2021

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Maksud dan Tujuan Laporan	1
A.1. Maksud Laporan	1
A.2. Tujuan Laporan.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
B.1. Kedudukan	3
B.2. Tugas	3
B.3. Fungsi	3
C. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	8
D. Isu Strategis.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Indikator Kinerja Utama	9
B. Perjanjian Kinerja.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
A.1. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2021	21
A.2. Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2020 dan 2021	26
A.3. Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2021 dan Target Kinerja Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)	29
A.4. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	32
A.5. Analisis Atas Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran	36
B. Realisasi Anggaran	40
BAB IV PENUTUP.....	52
LAMPIRAN	
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	
B. Proses Bisnis Bappeda	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	10
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	12
Tabel 3.1	Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2021.....	22
Tabel 3.2	Realisasi IKU Tahun 2021.....	25
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021	27
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021 dan Target Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)	30
Tabel 3.5	Realisasi Indikator 1 Sasaran 1	32
Tabel 3.6	Realisasi Indikator 2 Sasaran 1	33
Tabel 3.7	Realisasi Indikator 3 Sasaran 1	33
Tabel 3.8	Realisasi Indikator 4 Sasaran 1	34
Tabel 3.9	Realisasi Indikator 5 Sasaran 1	36
Tabel 3.10	Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis	37
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran Menurut Kegiatan Tahun 2021	40
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran Menurut Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Jayawijaya.....	7
Gambar 2	Musrenbang RKPD 2021 Distrik & Kabupaten tahun 2020	35

BAB I PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

1. Maksud Laporan

- a. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Bappeda;
- b. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Bappeda;
- c. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan;
- d. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalamr angka mencapai tujuan dan sasaran.

2. Tujuan Laporan

- a. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Bappeda kepada Bupati;
- b. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan kegiatan Bappeda;
- c. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Bappeda.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang perencanaan pembangunan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Jayawijaya berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan / atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya;
8. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya.

B.1 Kedudukan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang perencanaan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B.2 Tugas

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang perencanaan.

B.3 Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya terdiri dari :

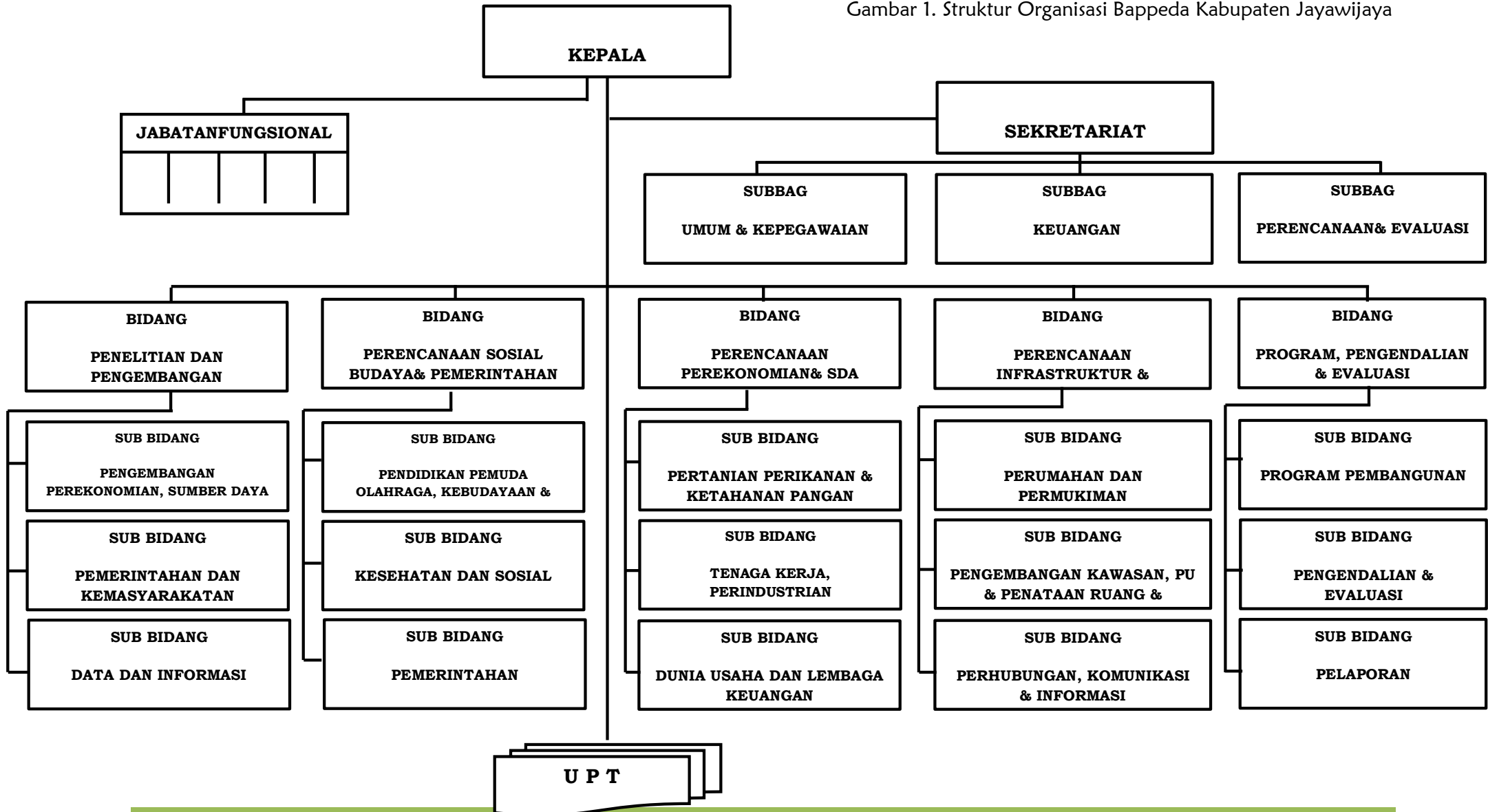
- a. **Kepala Badan**
- b. **Sekretaris**, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- c. **Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :**
 1. Sub Bidang Perekonomian, SumberDayaAlam dan Teknologi
 2. Sub Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
 3. Sub Bidang Data dan Informasi
- d. **Bidang Perencanaan, Sosial Budaya dan Pemerintahan, membawahi :**
 1. Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
 2. Sub Bidang Kesehatan dan Sosial
 3. Sub BidangPemerintahan
- e. **Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi :**
 1. Sub Bidang Pertanian, Pertanian dan Ketahanan Pangan
 2. Sub Bidang Tenaga Kerja , Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
 3. Sub Bidang Dunia Usaha dan Lembaga Keuangan
- f. **Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan, membawahi :**
 1. Sub Bidang Perumahan dan Permukiman
 2. Sub Bidang Pengembangan Kawasan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
 3. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- g. **Bidang Program,Pengendalian dan Evaluasi, membawahi :**

1. Sub Bidang Program Pembangunan
2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi
3. Sub Bidang Pelaporan

h. Kelompok Jabatan Fungsional

- i. UPTD

Gambar 1. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Jayawijaya



C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappeda masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi data pembangunan yang menyeluruh;
2. Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan dengan OPD sehingga masih terjadi ketidakselarasan sebagian *output* dan *outcome* yang dihasilkan;
3. Belum optimalnya hasil riset sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

D. ISU STRATEGIS

Perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Bappeda sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah. Analisis isu strategis dilakukan melalui proses *brainstorming* dan *mapping* jenis layanan yang telah dilakukan oleh Bappeda, faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan layanan, tantangan dan peluang pengembangan layanan. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Bappeda adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan OPD sehingga terjadi ketidakselarasan output, outcome yang dihasilkan dan kontribusinya pada pencapaian sasaran daerah;
2. Belum optimalnya hasil riset sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarnya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang – undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan – penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Bappeda mengampu urusan perencanaan pembangunan daerah.

Berdasar urusan dan program yang diampu, Bappeda mendukung pencapaian misi Kabupaten Jayawijaya yang tercantum pada RPJMD yaitu : *misi 1, Meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah* dengan *sasaran (2) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya mengampuh dua fungsi penunjang urusan yaitu fungsi penunjang *perencanaan pembangunan* dan fungsi penunjang *Penelitian dan Pengembangan*. Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indicator – indicator kinerja sasaran. Keseluruhan indikator kinerja utama Bappeda sebanyak 6 (enam) indikator.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	IKU	Cara Perhitungan	Target 2021
1	2	3	4
1	Persentase OPD dengan tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD kategori baik*)	Jumlah OPD dengan tingkat Keselarasan Renstra terhadap RPJMD kategori baik _____ X 100% Jumlah seluruh OPD	51,74
2	Persentase OPD dengan tingkat keselarasan Renja terhadap Renstra kategori baik*)	Jumlah OPD dengan tingkat keselarasan Renja terhadap Renstra kategori baik _____ X 100% Jumlah seluruh Renja OPD	51,74
3	Persentase tingkat keselarasan RKPd terhadap RPJMD kategoribaik*)	Jumlah program RKPd yang selaras dengan RPJMD kategori baik _____ X 100% Jumlah seluruh program RKPd	90
4	Persentase usulan musrenbang yang diakomodir dalam RKPd	Jumlah usulan musrenbang yang diakomodir dalam RKPd _____ X 100% Jumlah seluruh usulan musrenbang RKPd	80
5	Persentase tingkat capaian target pembangunan kategori baik*)	Jumlah capaian indikator kinerja sasaran pembangunan daerah kategori baik _____ X 100% Jumlah indikator kinerja sasaran pembangunan daerah	85
6	Persentase pemanfaatan data hasil penelitian dalam menunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah data hasil penelitian yang dimanfaatkan _____ X 100% Jumlah seluruh data hasil penelitian	60

B. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2021 mengacu pada Renstra Tahun 2018 – 2023. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2021 meliputi 5 (lima) sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 6 (enam) indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (*cascading*) mulai dari eselon II, eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2021*

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target				Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	
				TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan	1	Persentase OPD dengan tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD kategori baik	Nilai	0	0	0	51,74	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Penjabaran konsistensi Program RKPD terhadap RPJMD dan APBD terhadap RKPDP
		2	Persentase OPD dengan tingkat keselarasan Renja terhadap Rrenstra kategori baik		0	0	0	51,74	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase target indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD bidang pemerintahan & pembangunan manusia yang tercapai
		3	Persentase tingkat Keselarasan RKPDP*) terhadap RPJMD Kategori Baik		0	0	0	90	1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) 2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah koordinasi Jumlah asistensi Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

									<p>4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)</p> <p>5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</p> <p>6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</p>	<p>Jumlah koordinasi</p> <p>Jumlah asistensi</p> <p>Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi</p>
									Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase target indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD bidang ekonomi dan sumber daya alam yang tercapai
									1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah koordinasi

									2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah asistensi
									3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
									4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi
									5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah asistensi
									6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

									Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase target indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD bidang infrastruktur dan prasarana wilayah yang tercapai
									1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi
									2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah asistensi
									3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
									4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi
									5. Asistensi Penyusunan Dokumen	Jumlah asistensi

									Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
2	Meningkatnya kualitas usulan Musrenbang	1	Persentase usulan Musrebang yang diakomodir dalam RKP	%	0	0	0	80	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase keselarasan program antara RPJMD dengan RKP 2. Persentase indikator kinerja tujuan dan sasaran dalam Renja yang berorientasi hasil 3. Persentase indikator kinerja program yang mendukung capaian indikator kinerja sasaran dan tujuan 4. Persentase keterisian data dan informasi dalam sistem informasi pembangunan daerah 5. Persentase dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja yang disusun berbasis teknologi informasi 6. Persentase OPD yang menyusun dokumen Renja dan Laporan Evaluasi kinerja Triwulanan
									Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah, Dokumen Penganggaran Daerah dan Dokumen Pelaporan

									Daerah yang disusun	
									1. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 2. Pelaksanaan Konsultasi Publik 3. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD / Lintas SKPD 4. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota 5. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Koordinasi penelaahan dokumen renbangda dengan dokumen lain Jumlah Rumusan konsultasi publik Jumlah Rumusan Forum OPD Jumlah Rumusan Musrenbang Jumlah koordinasi penyusunan & penetapan dokumen renbangda
3	<i>Meningkatnya realisasi target-target pembangunan</i>	1	Persentase tingkat Capaian target pembangunan kategori baik	%	0	0	0	85	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 1. Persentase keselarasan program antara RPJMD dengan RKPD 2. Persentase indikator kinerja tujuan dan sasaran dalam Renja yang berorientasi hasil 3. Persentase indikator kinerja program yang mendukung capaian indikator kinerja sasaran dan tujuan 4. Persentase keterisian data dan informasi dalam sistem informasi pembangunan daerah 5. Persentase dokumen	

										perencanaan dan pengukuran kinerja yang disusun berbasis teknologi informasi 6. Persentase OPD yang menyusun dokumen Renja dan Laporan Evaluasi kinerja Triwulanan
										Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen laporan triwulan monitoring dan Evaluasi Program / Kegiatan APBN dan APBD dan SPM
										1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota 2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah koordinasi, pengendalian & pelaksanaan pembangunan Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
4	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	1	Persentase pemanfaatan data hasil penelitian dalam menunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah	%	0	0	0	60	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase target indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang tercapai
										Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

									1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan
									Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomidan pembangunan
									1. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen penelitian tanaman dwioka
									Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen Inovasi & teknologi
									1. Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 2. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Penelitian dan penguatan inovasi daerah Jumlah sosialisasi
5	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan Kinerja Bappeda	1	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materi hasil Pemeriksaan BPK pada Bappeda	%	0	0	0	0,4	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
									Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran
									1. Koordinasi dan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir

									Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Tahun Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran
		2	Predikat Evaluasi SAKIP Bappeda	Nilai	0	0	0	80 (BB)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD
									1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Lakip SKPD Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2021

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja Bappeda bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Untuk skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja >95% sampai dengan 100% = Sangat Berhasil;
- b. Capaian kinerja >80% sampai dengan 95% = Berhasil;
- c. Capaian kinerja >50% sampai dengan 80% = Cukup Berhasil;
- d. Capaian kinerja <50% = Kurang Berhasil.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis. Secara rinci capaian masing – masing indikator kinerja sasaran tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2021

1	2	3	4	5	Target Kinerja Sasaran		8	9	10
					6	7			
Sasaran	Indikator Sasaran	Cara Perhitungan Indikator Sasaran	Satuan	Target 2021	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Predikat		
1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah badan pelayanan publik	1	Persentase OPD dengan tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD kategori baik *)	Jumlah OPD dengan tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD kategori baik $\frac{\text{Jumlah OPD dengan tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD kategori baik}}{\text{Jumlah seluruh OPD}} \times 100\%$	%	51,74	100	193,27	Sangat Berhasil
		2	Persentase OPD dengan tingkat keselarasan Renja terhadap Rrenstra kategori baik*)	Jumlah Renja OPD yang selaras dengan Renstra OPD $\frac{\text{Jumlah Renja OPD yang selaras dengan Renstra OPD}}{\text{Jumlah seluruh renja OPD}} \times 100\%$	%	51,74	100	193,27	Sangat Berhasil
		3	Persentase tingkat keselarasan RKPd terhadap RPJMD kategori baik*)	Jumlah program RKPd yang selaras dengan RPJMD kategori baik $\frac{\text{Jumlah program RKPd yang selaras dengan RPJMD kategori baik}}{\text{Jumlah seluruh program RKPd}} \times 100\%$	%	90	100	111,11	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya kualitas usulan musrebang	1	Persentase usulan musrebang yang diakomodir dalam RKPd	Jumlah usulan musrebang yang diakomodir dalam RKPd $\frac{\text{Jumlah usulan musrebang yang diakomodir dalam RKPd}}{\text{Jumlah seluruh usulan musrebang RKPd}} \times 100\%$	%	80	80	100	Sangat Berhasil
3	Meningkat realisasi target-target pembangunan	1	Persentase tingkat capaian target pembangunan kategori baik*)	Jumlah capaian indikator kinerja sasaran pembangunan daerah kategori baik $\frac{\text{Jumlah capaian indikator kinerja sasaran pembangunan daerah kategori baik}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran pembangunan daerah}} \times 100\%$	%	85	80	94,12	Berhasil

4.	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja Bappeda	1	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materi hasil Pemeriksaan BPK pada Bappeda	Jumlah anggaran temuan materi hasil pemeriksaan BPK pada Bappeda _____ X 100% Total anggaran yang terealisasi pada Bappeda	%	0,4	0	104	Sangat Berhasil
		2	Predikat Evaluasi SAKIP Bappeda	Nilai dari hasil evaluasi AKIP yang dikeluarkan oleh tim APIP kab. Jayawijaya	Nilai SAKIP Bappeda	80 (BB)			Belum ada nilai dari APIP
5.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	1	Persentase pemanfaatan data hasil penelitian dalam menunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah data hasil penelitian yang dimanfaatkan _____ X 100% Jumlah seluruh data hasil penelitian	%	60	25	41,67	Kurang Berhasil

Catatan : Merupakan indikator yang menjadi PK eselon 2 dan Eselon 3

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis organisasi yang memiliki nilai paling strategis dibandingkan indikator lainnya. IKU merupakan bagian dari indikator kinerja sasaran strategis.

Tabel 3.2
Realisasi IKU Tahun 2021

1	2	3	4	5	Target Kinerja Sasaran		8	9	10
					6	7			
1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah badan pelayanan publik	1	Persentase OPD dengan tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD kategori baik *)	Jumlah OPD dengan tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD kategori baik $\frac{\text{Jumlah OPD dengan tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD kategori baik}}{\text{Jumlah seluruh OPD}} \times 100\%$	%	51,74	100	193,27	Sangat Berhasil
		2	Persentase OPD dengan tingkat keselarasan Renja terhadap Rrenstra kategori baik*)	Jumlah Renja OPD yang selaras dengan Renstra OPD $\frac{\text{Jumlah Renja OPD yang selaras dengan Renstra OPD}}{\text{Jumlah seluruh renja OPD}} \times 100\%$	%	51,74	100	193,27	Sangat Berhasil
		3	Persentase tingkat keselarasan RKPDP terhadap RPJMD kategori baik*)	Jumlah program RKPDP yang selaras dengan RPJMD kategori baik $\frac{\text{Jumlah program RKPDP yang selaras dengan RPJMD kategori baik}}{\text{Jumlah seluruh program RKPDP}} \times 100\%$	%	90	100	111,11	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya kualitas usulan musrebang	1	Persentase usulan musrebang yang diakomodir dalam RKPDP	Jumlah usulan musrebang yang diakomodir dalam RKPDP $\frac{\text{Jumlah usulan musrebang yang diakomodir dalam RKPDP}}{\text{Jumlah seluruh usulan musrebang RKPDP}} \times 100\%$	%	80	80	100	Sangat Berhasil
3	Meningkat realisasi target-target pembangunan	1	Persentase tingkat capaian target pembangunan kategori baik*)	Jumlah capaian indikator kinerja sasaran pembangunan daerah kategori baik $\frac{\text{Jumlah capaian indikator kinerja sasaran pembangunan daerah kategori baik}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran pembangunan daerah}} \times 100\%$	%	85	80	94,12	Berhasil
4	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	1	Persentase pemanfaatan data hasil penelitian dalam menunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah data hasil penelitian yang dimanfaatkan $\frac{\text{Jumlah data hasil penelitian yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah seluruh data hasil penelitian}} \times 100\%$	%	60	25	41,67	Kurang Berhasil

2. Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2020 dan 2021

Pencapaian Kinerja Tahun 2021 merupakan bagian dari kinerja strategis Bappeda sebagaimana yang tercantum pada Renstra Periode Tahun 2018 – 2023. Pencapaian kinerja tahun ke – 3 (tiga) Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun kedua periode Renstra untuk mengetahui kecenderungan / trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi / capaian kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

Sasaran		Indikator sasaran		Cara Perhitungan Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Program Pembangunan Daerah	1	Persentase OPD dengan tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD kategori baik *)	Jumlah OPD dengan tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD kategori baik _____ X 100% Jumlah seluruh OPD	%	64,29	100
		2	Persentase OPD dengan tingkat keselarasan Renja terhadap Renstra kategori baik*)	Jumlah Renja OPD yang selaras dengan Renstra OPD _____ X 100% Jumlah seluruh renja OPD	%	53,57	100
		3	Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD kategori baik*)	Jumlah program RKPD yang selaras dengan RPJMD kategori baik _____ X 100% Jumlah seluruh program RKPD	%	100	100
2	Meningkatnya kualitas usulan musrebang	1	Persentase usulan musrebang yang diakomodir dalam RKP	Jumlah usulan musrebang yang diakomodir dalam RKPD _____ X 100% Jumlah seluruh usulan musrebang RKPD	%	91,65	80
3	Meningkat realisasi target-target pembangunan	1	Persentase tingkat capaian target pembangunan kategori baik*)	Jumlah capaian indikator kinerja sasaran pembangunan daerah kategori baik _____ X 100% Jumlah indikator kinerja sasaran pembangunan daerah	%	61,4	80
4.	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja Bappeda		Persentase Anggaran yang menjadi temuan materi hasil Pemeriksaan BPK pada Bappeda	Jumlah anggaran temuan materi hasil pemeriksaan BPK pada Bappeda _____ X 100% Total anggaran yang terealisasi pada	%	0	0

			Bappeda				
			Predikat Evaluasi SAKIP Bappeda	Nilai dari hasil evaluasi AKIP yang dikeluarkan oleh tim APIP kab. Jayawijaya	Nilai SAKIP Bappeda	71,74 (BB)	Belum ada nilai dari APIP
5.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan		Persentase pemanfaatan data hasil penelitian dalam menunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah data hasil penelitian yang dimanfaatkan _____ X 100% Jumlah seluruh data hasil penelitian	%	30	25

3. Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2021 dan Target Kinerja Sasaran Tahun 2023 (akhir periode Renstra)

Indikator kinerja sasaran Tahun 2021 merupakan ukuran kuantitatif dan / atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Periode Tahun 2018 – 2023. Pencapaian kinerja tahun kedua (2021) Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Renstra (2023) untuk mengetahui kemampuan Bappeda selama 2 (dua) tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan antara realisasi / capaian kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021 dan
Target Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)

Sasaran		Indikator sasaran		Cara Perhitungan Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Program Pembangunan Daerah	1	Persentase OPD dengan tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD kategori baik *)	Jumlah OPD dengan tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD kategori baik _____ X 100% Jumlah seluruh OPD	%	100	100
		2	Persentase OPD dengan tingkat keselarasan Renja terhadap Rrenstra kategori baik*)	Jumlah Renja OPD yang selaras dengan Renstra OPD _____ X 100% Jumlah seluruh renja OPD	%	100	100
		3	Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD kategori baik*)	Jumlah program RKPD yang selaras dengan RPJMD kategori baik _____ X 100% Jumlah seluruh program RKPD	%	100	95
2	Meningkatnya kualitas usulan musrebang	1	Persentase usulan musrebang yang diakomodir dalam RKP	Jumlah usulan musrebang yang diakomodir dalam RKP _____ X 100% Jumlah seluruh usulan musrebang RKP	%	80	90
3	Meningkat realisasi target-target pembangunan	1	Persentase tingkat capaian target pembangunan kategori baik*)	Jumlah capaian indikator kinerja sasaran pembangunan daerah kategori baik _____ X 100% Jumlah indikator kinerja sasaran pembangunan daerah	%	80	95
4.	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja		Persentase Anggaran yang menjadi temuan materi hasil Pemeriksaan	Jumlah anggaran temuan materi hasil opemeriksaan BPK pada Bappeda	%	0	0,2

	Bappeda		BPK pada Bappeda	_____ X 100% Total anggaran yang terealisasi pada Bappeda			
			Predikat Evaluasi SAKIP Bappeda	Nilai dari hasil evaluasi AKIP yang dikeluarkan oleh tim APIP kab. Jayawijaya	Nilai SAKIP Bappeda	Belum ada nilai dari APIP	85 (BB)
5.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan		Persentase pemanfaatan data hasil penelitian dalam menunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah data hasil penelitian yang dimanfaatkan _____ X 100% Jumlah seluruh data hasil penelitian	%	25	80

4. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam pencapaian target kinerja sasaran, terdapat faktor penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.

4.1 Sasaran 1 :

“ **Meningkatnya Kualitas Program Pembangunan Daerah**”. Hasil evaluasi capaian kinerja **Meningkatnya Kualitas Program Pembangunan Daerah** melalui 3 (tiga) indikator kinerja, mendapatkan angka rata – rata tingkat capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat Sangat Berhasil.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.5 Realisasi Indikator 1 Sasaran 1

Indikator Kinerja	Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2	3	4
Persentase OPD dengan tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD kategori baik *)	51,74	100	193,27

Berdasarkan analisis terhadap Rata – rata Persentase OPD dengan tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD kategori baik, realisasi sebesar 100% dari target 51,74%. Realisasi ini dilihat dari jumlah Renstra OPD yang berkategori baik dari seluruh jumlah Renstra OPD di kabupaten Jayawijaya.

Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :

- a. Adanya peningkatan frekuensi pendampingan penyusunan Renstra bagi OPD melalui asistensi langsung pada saat penyusunan.

Catatan penting dalam pencapaian sasaran :

Pada saat penyusunan Renstra, OPD memperhatikan keselarasan sasaran startegis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2018 – 2023.

Tabel 3.6 Realisasi Indikator 2 Sasaran 1

Indikator Kinerja	Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2	3	4
Persentase OPD dengan tingkat keselarasan Renja terhadap Renstra	51,74	100	193,27

Berdasarkan analisis terhadap Persentase OPD dengan tingkat keselarasan Renja terhadap Renstra kategori baik, realisasi sebesar 100% dari target 51,74%. Realisasi ini dilihat dari jumlah renja OPD yang berkategori baik dari keseluruhan jumlah Renja OPD di kabupaten Jayawijaya.

Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :

- a. Adanya peningkatan frekuensi pendampingan penyusunan Renja mulai dari penyusunan Rancangan Awal Renja sampai finalisasi Renja bagi OPD melalui asistensi langsung pada saat penyusunan.

Catatan penting dalam pencapaian sasaran :

- a. Pada saat penyusunan Renja, OPD memperhatikan keselarasan sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang terdapat dalam Renstra OPD 2018 – 2023.

Tabel 3.7 Realisasi Indikator 3 Sasaran 1

Indikator Kinerja	Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2	3	4
Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD kategori baik	90	100	111,11

Berdasarkan analisis terhadap Rata – rata persentase capaian program pembangunan daerah, realisasi sebesar 100% dari target 90%. Realisasi ini dilihat dari jumlah program RKPD yang selaras dengan RPJMD kategori baik dari jumlah keseluruhan program RKPD.

Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :

Penyusunan RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah berpedoman pada RPJMD yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang kemudian dilaporkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati.

Catatan penting dalam pencapaian sasaran :

- a. Dengan diberlakukannya Permendagri nomor 90 tahun 2019 dan Kepmen 050/3708 tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan pada RPJMD yang masih menggunakan nomenklatur permendagri nomor 13 tahun 2006 sehingga pengukuran kesesuaian RKPD terhadap RPJMD lebih selaras dengan tidak merubah hal – hal yang bersifat prinsip dalam pencapaian misi RPJMD.

4.2 Sasaran 2 :

“ **Meningkatnya kualitas usulan Musrenbang** “. Hasil evaluasi capaian kinerja **Meningkatnya kualitas usulan Musrebang** dengan 1 (satu) indikator kinerja, mendapatkan angka tingkat capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat Sangat Berhasil.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.8 Realisasi Indikator 1 Sasaran2

Indikator Kinerja	Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Persentase usulan Musrebang yang diakomodir dalam RKPD	80	80	100

Berdasarkan analisis terhadap Persentase usulan Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD, realisasi sebesar 80% dari target 80%. Hal ini disebabkan beberapa kegiatan yang telah

direncanakan tidak dapat terealisasi karena dibiayai dari pusat dan Provinsi Papua.



Gambar 2. Musrenbang RKPD 2021 Distrik & Kabupaten Tahun 2020

Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :

- a. OPD mengajukan program sesuai dengan Renstra OPD 2018 – 2023 yang sudah selaras dengan RPJMD 2018 – 2023
- b. Pengajuan usulan Musrenbang berpedoman pada Rancangan Awal RKPD

Catatan penting dalam pencapaian sasaran :

- a. OPD harus memperhatikan usulan program agar sesuai dengan sasaran strategis perangkat daerah untuk mendukung sasaran pembangunan daerah.

4.3 Sasaran 3 :

“ Meningkatnya realisasi target – target pembangunan “. Hasil evaluasi capaian kinerja **Meningkatnya realisasi target – target pembangunan** melalui 1 (satu) indikator kinerja, mendapatkan

angka tingkat capaian kinerja sebesar 94,12% dengan predikat Berhasil

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.9 Realisasi Indikator 1 Sasaran3

Indikator Kinerja	Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2	3	4
Persentase tingkat capaian target pembangunan kategori baik	85	80	94,12

Berdasarkan analisis terhadap Perentase tingkat capaian target – target pembangunan kategori baik, realisasi nilai 80% dari target nilai 85%. Hal ini disebabkan beberapa kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat terealisasi, dan / atau di lanjutkan ke tahun berikut.

Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :

- a. Penetapan target program di analisa bersama – sama antara Bappeda dengan OPD pengampu Program sehingga target terukur dan achievable;
- b. Melakukan desk / diskusi pencapaian target yang telah disepakati untuk menyamakan persepsi indikator program dan kegiatan.

Catatan penting dalam pencapaian sasaran :

- a. Masih adanya program yang berpredikat sedang (belum mencapai target) karena pengampu program yang tidak maksimal dan atau perbedaan persepsi dalam memahami definisi operasional indikator program
- b. Menyatukan persepsi tentang pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

5. Analisis Atas Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran

Rencana belanja dalam pencapaian 5 (lima) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator sasaran tahun 2021 dengan Belanja

sebesar Rp 12.949.601.962,00 dengan realisasi Rp 10.041.337.684,00 atau 74,96 untuk mencapai sasaran dengan rata – rata tingkat capaian 74,55 %, masuk kategori **efisien**.

Tabel 3.10
Efisiensi (Rasio Fisik dan Keuangan)

No	Sub Kegiatan	Realisasi Fisik (%)	Realisasi keuangan (%)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (renstra dan renja)	100	100	Efisien
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	100	Efisien
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	100	Efisien
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65,44	65,44	Efisien
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	100	Efisien
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	100	100	Efisien
7	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	100	Efisien
8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	100	Efisien
9	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	99,97	99,97	Efisien
10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	64,44	64,44	Efisien
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	42,86	61,09	Efisien
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100	100	Efisien
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	100	Efisien
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	100	Efisien
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	93,01	93,01	Efisien
16	Penyediaan Bahan / Material	100	100	Efisien
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	Tidak Efisien
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87,34	87,34	Efisien

19	Pengadaan Mebel	100	100	Efisien
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	100	Efisien
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75	98,34	Efisien
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78,05	78,05	Efisien
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	100	Efisien
24	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	71,61	100	Efisien
25	Pelaksanaan Konsultasi Publik	43,38	100	Efisien
26	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD / Lintas SKPD	74,96	100	Efisien
27	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	71,52	100	Efisien
28	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	69,37	100	Efisien
29	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	56,18	0	Tidak Efisien
30	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	90,23	100	Efisien
31	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	100	100	Efisien
32	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota	82,28	100	Efisien
33	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	84,01	100	Efisien
34	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	49,95	100	Efisien
35	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	0,00	100	Efisien
36	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	0,00	100	Efisien
37	Koordinasi Penyusunan Dokumen	34,90	100	Efisien

	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
38	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0,00	100	Efisien
39	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	54,46	100	Efisien
40	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	89,31	100	Efisien
41	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	96,93	100	Efisien
42	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	99,64	100	Efisien
43	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	66,98	100	Efisien
44	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	99,93	100	Efisien
45	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	57,75	100	Efisien
46	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	70,15	100	Efisien
47	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	62,83	100	Efisien
48	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	63,10	100	Efisien
49	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	46,39	100	Efisien

50	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	66,30	100	Efisien
51	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	75,15	100	Efisien
52	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	79,75	100	Efisien
53	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	96,31	100	Efisien
54	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	85,64	100	Efisien
55	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	55,23	83,33	Efisien

B. REALISASI ANGGARAN

Sesuai P – APBD tahun anggaran 2021 Bappeda Kabupaten Jayawijaya mengelola anggaran sebesar **Rp 12.949.601.962,00** yang terdiri dari Belanja operasi dan Belanja Barang / Jasa / modal. Belanja Operasi digunakan untuk belanja pegawai, yaitu belanja gaji dan tunjangan. Sedangkan Belanja modal digunakan membiayai kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Jayawijaya. Realisasi keuangan belanja sebesar 77,54% dengan penyerapan dana sebesar **Rp 10.041.337.684,00** Dari sisi akuntabilitas kinerja Program dan Kegiatan, Bappeda melaksanakan 4 program dan 17 kegiatan dan 55 subkegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir bulan Desember tahun 2021 adalah realisasi fisik sebesar 82,62%.

Tabel dari realisasi anggaran pencapaian sasaran strategis tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Menurut Sub Kegiatan Tahun 2021

No	Sub Kegiatan	Realisasi Fisik (%)	Realisasi keuangan (%)	Keterangan
1	2	3	4	5

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (renstra dan renja)	100	100	Efisien
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	100	Efisien
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	100	Efisien
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65,44	65,44	Efisien
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	100	Efisien
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	100	100	Efisien
7	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	100	Efisien
8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	100	Efisien
9	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	99,97	99,97	Efisien
10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	64,44	64,44	Efisien
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	42,86	61,09	Efisien
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100	100	Efisien
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	100	Efisien
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	100	Efisien
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	93,01	93,01	Efisien
16	Penyediaan Bahan / Material	100	100	Efisien
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	Tidak Efisien
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87,34	87,34	Efisien
19	Pengadaan Mebel	100	100	Efisien
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	100	Efisien
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75	98,34	Efisien
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78,05	78,05	Efisien
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	100	Efisien
24	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen	71,61	100	Efisien

	Kebijakan Lainnya			
25	Pelaksanaan Konsultasi Publik	43,38	100	Efisien
26	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD / Lintas SKPD	74,96	100	Efisien
27	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	71,52	100	Efisien
28	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	69,37	100	Efisien
29	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	56,18	0	Tidak Efisien
30	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	90,23	100	Efisien
31	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	100	100	Efisien
32	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota	82,28	100	Efisien
33	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	84,01	100	Efisien
34	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	49,95	100	Efisien
35	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	100	100	Efisien
36	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	100	100	Efisien
37	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	34,90	100	Efisien
38	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	100	100	Efisien
39	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	54,46	100	Efisien
40	Koordinasi Penyusunan Dokumen	89,31	100	Efisien

	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
41	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	96,93	100	Efisien
42	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	99,64	100	Efisien
43	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	66,98	100	Efisien
44	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	99,93	100	Efisien
45	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	57,75	100	Efisien
46	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	70,15	100	Efisien
47	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	62,83	100	Efisien
48	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	63,10	100	Efisien
49	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	46,39	100	Efisien
50	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	66,30	100	Efisien
51	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	75,15	100	Efisien
52	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	79,75	100	Efisien

53	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	96,31	100	Efisien
54	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	85,64	100	Efisien
55	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	55,23	83,33	Efisien

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Menurut Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis
Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
MISI 1 : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK							
1	Meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	<i>Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan</i>	Persentase OPD dengan tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD kategori baik	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	1.135.100.000,00	673.534.000,00	59,37
			Persentase OPD dengan tingkat keselarasan Renja terhadap Rrenstra kategori baik*)	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	385.492.000,00	116.661.000,00	30,26
			Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD kategori baik*)	1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50.000.000,00	24.975.000,00	49,95
				2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	40.474.000,00	0,00	0,00
				3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	39.156.000,00	0,00	0,00
				4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	75.000.000,00	26.176.000,00	34,90

				Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
				5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	60.573.000,00	0,00	0,00
				6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	120.289.000,00	65.510.000,00	54,46
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	385.505.000,00	325.696.000,00	84,49
				1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	70.000.000,00	62.514.000,00	89,31
				2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	59.330.000,00	57.510.000,00	96,93
				3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	45.800.000,00	45.630.000,00	99,63

				4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	80.000.000,00	53.584.000,00	66,98
				5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	73.885.000,00	73.833.000,00	99,93
				6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	56.490.000,00	32.625.000,00	57,75
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	364.103.000,00	231.177.000,00	63,49
				1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	75.000.000,00	52.615.000,00	70,15
				2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	46.380.000,00	29.140.000,00	62,83
				3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	60.668.000,00	30.280.000,00	63,10

				Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			
				4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	75.000.000,00	34.795.000,00	46,39
				5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	46.380.000,00	30.750.000,00	66,30
				6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	60.675.000,00	45.597.000,00	75,15
		Meningkatnya kualitas usulan musrebang	Persentase usulan musrebang yang diakomodir dalam RKPd	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	2.733.014.700,00	2.021.695.699,00	73,97
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.044.153.500,00	1.428.102.999,00	69,86
				1. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	179.782.000,00	128.739.000,00	71,61
					62.150.000,00	26.960.000,00	43,38
				2. Pelaksanaan Konsultasi Publik	279.950.000,00	209.850.000,00	74,96

				3. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD / Lintas SKPD	303.109.500,00	216.791.000,00	71,52
				4. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	1.219.162.000,00	845.762.999,00	69,37
				5. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota			
		Meningkat realisasi target – target pembangunan	Persentase tingkat capaian target pembangunan kategori baik*)	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah			
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	350.000.000,00	291.442.700,00	83,27
				1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota	150.000.000,00	123.421.700,00	82,28
				2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	200.000.000,00	168.021.000,00	84,01
		Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	Persentase pemanfaatan data hasil penelitian dalam menunjang	Program penelitian dan pengembangan daerah	1.149.396.750,00	955.319.515,00	83,11

			penyusunan perencanaan pembangunan daerah				
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	355.012.750,00	283.127.513,00	79,75
				1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	355.012.750,00	283.127.513,00	79,75
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	350.000.000,00	337.100.000,00	96,31
				1. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	350.000.000,00	337.100.000,00	96,31
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	444.384.000,00	335.092.002,00	91,67
				1. Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	294.384.000,00	252.241.098,00	85,68
				2. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	150.000.000,00	82.850.904,00	55,23
		Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja Bappeda	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materi hasil Pemeriksaan BPK pada Bappeda	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.625.150.412	3.806.703.396,00	82,30

				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	4.605.150.412,00 10.000.000,00 10.000.000,00	3.786.703.396,00 10.000.000,00 10.000.000,00	82,23 100 100
			Predikat Evaluasi SAKIP Bappeda	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00	46.544.000,00	93,09
				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00	20.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 6.544.000,00	100 100 100 65,44

BAB IV PENUTUP

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2021, Bappeda Kabupaten Jayawijaya menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2021 sebagai cerminan dari hasil kinerja Bappeda selama 1 (satu) tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Pengukuran kinerja Bappeda Kabupaten Jayawijaya tahun 2021, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing – masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja berjenjang dari Eselon II, Eselon III dan Eselon IV.

Dalam pencapaian tersebut ada pencapaian indikator kinerja yang pencapaiannya berhasil dari target yang telah ditentukan. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari kerjasama, dan komitmen seluruh personil Bappeda Jayawijaya.

Namun demikian dalam pencapaian indikator kinerja tersebut tidak lepas dari adanya kendala – kendala teknis. Adapun kendala – kendala yang dihadapi yakni belum terjaminnya validitas sebagian data dan informasi yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan.

**LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PROSES BISNIS BAPPEDA**